

**KOLABORASI RISET DOSEN & MAHASISWA**

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE***

**TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN**

***MANDATORY DISCLOSURE***

**KONVERGENSI IFRS**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**DIAH SETYOWATI**

**NIM : 2012310144**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2016**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Diah Setyowati  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 12 April 1994  
N.I.M : 201210144  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap  
Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*  
Konvergensi IFRS

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 05 April 2016

  
**(Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., Ak)**

Ketua Program Sarjana Akuntansi,  
Tanggal : 05 April 2016

  
**(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., OIA)**

PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
*MANDATORY DISCLOSURE*  
KONVERGENSI IFRS

Diah Setyowati  
STIE PERBANAS SURABAYA  
[diahsetyowati55@gmail.com](mailto:diahsetyowati55@gmail.com)

Nurul Hasanah Uswati Dewi  
STIE PERBANAS SURABAYA  
Email : [nurul@perbanas.ac.id](mailto:nurul@perbanas.ac.id)  
Jl. Sidosermo Indah III/ 4 Surabaya

*Abstract*

*This study aims to determine the compliance level of convergence IFRS mandatory disclosure in manufacturing companies. Implementation of accounting standart has not enough to stopped management to manipulated the financial statements. So, corporate governance is needed as control system of management attitude to manage the company. Structure of corporate governance measured by the number of comissioners, the proportion of independent commissioners, managerial ownership, institusional ownership, the number of audit committe members.*

*The result of this study showed that the compliance level of convergence IFRS mandatory disclosure is 0,56995 or 56,99%. The result of multiple regression analays showed that the structure corporate governance which effect to compliance level of cenvergence IFRS mandatory disclosure is the number of comissioners and institusional ownership. Meanwhile, a variable proportion of independen commissioners, managerial ownership, the number of audit committe members not significantly influence with the compliance level of convergence IFRS mandatory disclosure.*

*Keywords : corporate governancce structure, compliance level of IFRS mandatory disclosure*

**Pendahuluan**

Globalisasi saat ini menuntut adanya sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, sehingga

adanya tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor (Gamayuni,

2009). Kepentingan stakeholders sangat berpengaruh bagi kemajuan perusahaan, maka untuk melindungi kepentingan stakeholders diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan yang mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan akuntansi yang berlaku secara internasional Dewi (2015). IFRS merupakan standar yang telah digunakan oleh lebih dari 150-an Negara, termasuk Jepang, China, Kanada dan 27 negara Uni Eropa. Indonesia mulai menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 bagi perusahaan yang telah mampu menerapkan IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar akuntansi internasional tersebut. sehingga berharap bahwa penggunaan IFRS dapat meningkatkan komparabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi berbasis akuntansi IFRS yang ada di perusahaan belum tentu menjamin akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* guna mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu perusahaan karena struktur *corporate governance* di setiap negara berbeda-beda.

*Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting dan untuk dilaksanakan mengingat

menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan.

Indonesia merupakan bagian integral dari program bisnis internasional atau global juga akan menghadapi masalah dalam standar atau praktik akuntansi

bahwa seringkali terjadi konflik kepentingan antar pemegang saham atau komisaris serta para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong agar terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Mendorong adanya penelitian ini dikarenakan pengungkapan dan transparansi pada laporan keuangan menjadi isu yang penting di Indonesia, selain itu masih ada perusahaan yang melakukan perekayasaan dalam laporan keuangan. Terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dipasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya yang dilakukan *mark-up* oleh PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga akan terjadi pengelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami, 2012).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan,

yaitu apakah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Struktur *corporate governance* merupakan susunan organ di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan tata kelola sebagai pihak pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan (Prawinandi *et al.*, 2012). Inti dari *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris (FGGI, 2001). Oleh karena itu, struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris serta komite audit yang merupakan suatu komite ada di bawah dewan komisaris.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Agency Theory**

*Agency theory* menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah (Sofyan Syafri Harahap, 2007:546). Hubungan keagenan akan terjadi apabila satu atau lebih individu yang bertindak sebagai *principle* menggunakan jasa seorang individu yang bertindak sebagai agen untuk mengelola dan

mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan dalam operasional perusahaan. Delegasi wewenang tersebut menyebabkan adanya kepentingan yang berbeda antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang disebut *agency problem*.

*Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yaitu bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan (Herawati, 2008). Agar investor lebih yakin bahwa dana yang mereka investasikan tidak disalahgunakan oleh pihak manajemen, langkah yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen adalah dengan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kinerja manajemen dalam laporan keuangan. Laporan tersebut adalah bukti bahwa pertanggungjawaban manajemen atas dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Guna untuk memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam pengelolaan dana milik investor dan meyakinkan kepada pemegang saham bahwa manajemen tidak akan melakukan kejahatan yang dapat merugikan pemegang saham maka konsep *corporate governance* diterapkan untuk dapat diminimalisasi (Ratnasari, 2011). Teori agensi berasumsi bahwa perilaku manusia dapat memberikan prediksi atau gambaran mengenai konsekuensi logis secara tepat dan menganggap bahwa individu memiliki banyak peran dalam organisasi sehingga penggunaan teori

agensi pada penelitian ini dianggap relevan (Pitasari & Septiani, 2014).

### **Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)**

*Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas kas keluar untuk suatu bisnis.

Konsep *corporate governance* yang baik akan mendorong adanya *mandatory disclosure* yang sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Secara singkat *good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan untuk meraih nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Muh.Arif Effendi 2009 : 2), maka hal ini dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, profesional, sehingga pengungkapan dalam laporan keuangan mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang.

### **Konvergensi IFRS**

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan merupakan

suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunakan di negara lain dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Konvergensi IFRS adalah suatu proses untuk menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Standar ini muncul karena adanya perkembangan dan tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis disuatu negara ikut serta dalam bisnis internasional, maka harus diperlukan standar internasional yang berlaku disemua negara untuk mempermudah proses membaca informasi pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan diberbagai negara.

Konvergensi IFRS bertujuan untuk terus meningkatkan informasi laporan keuangan yang diungkapkan secara *mandatory disclosure* agar dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain. Hal ini dikarenakan penyajian laporan keuangan yang menyajikan informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Struktur *Corporate Governance***

*Corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *corporate governance* mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Muh.Arif Effendi, 2009:2). Indonesia menganut sistem dua tingkat atau *two-tiers system*, yang artinya bahwa perusahaan mempunyai dua badan yang terpisah,

yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001).

*Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. Prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Prinsip *corporate governance* yang baik harus didasarkan pada lima hal, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*.

#### **Hubungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS.**

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberikan nasehat kepada dewan direksi. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executive Officer (CEO)* sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Anggita Pitasari dan

Anggita Pitasari dan Aditya Septiani (2014) mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya jumlah anggota komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, karena

jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi sulit, sednagkan jumlah anggota yang kecil akan menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, 2012) sehingga tidak dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib yang lebih memadai.

#### **Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.**

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan semakin berkualitas sehingga akan meningkatkan transparansi pada laporan keuangan (Wardani Prawinandi, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko 2012) terdapat hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, Suhardjanto, & Hrtoko 2012) hasil penelitiannya bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan semakin berkualitas sehingga akan meningkatkan transparansi pada laporan keuangan (Wardani Prawinandi, 2012).

#### **Hubungan Jumlah Anggota Komite Audit dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.**

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang harus dilaporkan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan dalam perusahaan dimana terdapat independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003 dalam Pitasari 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko 2012) didapatkan hasil bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

konvergensi IFRS, sedangkan hasil penelitian dari Anggita Pitasari menunjukkan bahwa jumlah anggota komite berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

#### **Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dalam perusahaan yang diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Huafang, 2007 dalam jurnal Wulan. 2012). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen dapat menjadi lebih semangat karena termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemenuhan keinginan dari pemegang saham yang tidak lain merupakan dirinya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

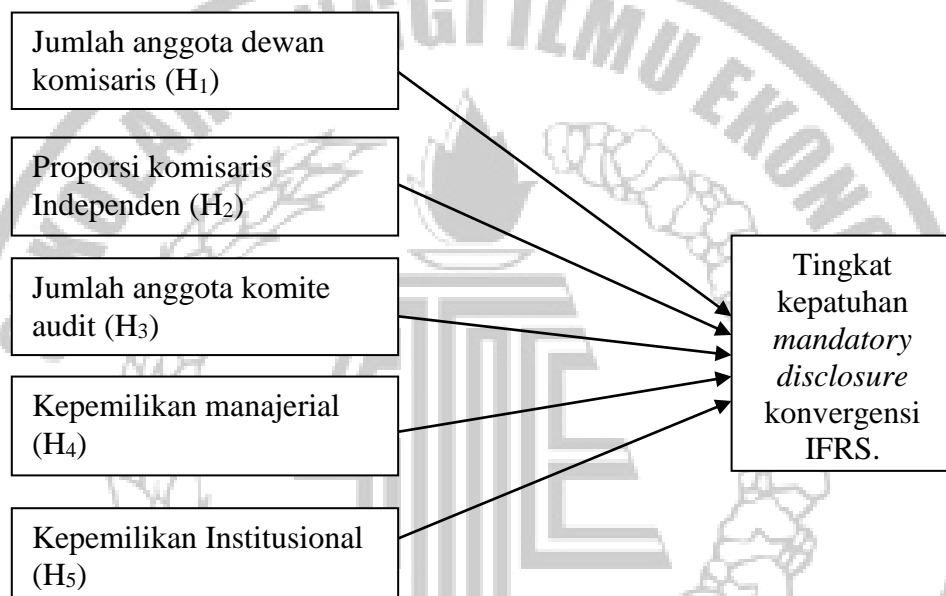
#### **Hubungan Kepemilikan Institutional dengan tingkat kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS.**

Semakin besar kepemilikan *Institutional* dalam perusahaan maka akan semakin besar pula dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga perusahaan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, Suhardjanto, & Hartoko (2012) didapatkan hasilnya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal

tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar.

Kerangka pemikiran yang medasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Peikiran**

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Sampel

Berdasarkan sample yang akan diteliti yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Populasi tersebut dipilih karena perusahaan manufaktur terdiri dari banyak sektor serta dalam menyajikan laporan keuangan dengan pengungkapan wajib menggunakan IAS yang berbeda beda. Dengan demikian

dapatmeneliti laporan tahunan apakah persahaantersebutmengungkapkan PSAK yang diterapkan.

Teknik untuk pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang menggunakan pertimbangan dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang menyampaikan

laporan tahunan di BEI dan mengungkapkan informasi struktur *corporate governance* dengan lengkap.

### **Data Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian arsip yang merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) yang berupa arsip data. Berdasarkan sumber data, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis, karena bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh *corporate governance*, yang di dalamnya terdapat variabel lainnya yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, sedangkan untuk variabel dependen meliputi umlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

### **Definisi Operasional Variabel**

**Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Menurut FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut KNKG (2006), jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan dengan perusahaan).

### **Proporsi Komisaris Independen**

Proporsi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). indikator proporsi komisaris independen dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Prawinandi, Suhardjanto, dan Triatmoko (2012) yaitu proporsi komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris dalam suatu perusahaan di periode t.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial menurut Zakarsyi (2008: 70) adalah presentasi saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris

dan direksi. Berdasarkan penjelasan diatas kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus:

$$KM = \frac{\text{kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional yaitu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional dirumuskan dengan sebagai berikut (Masdupi 2005).

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham beredar akhir tahun}}$$

### **Jumlah Anggota Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris yang memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit

internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010).

Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit yang sesuai dengan penelitian Zaluki dan Hussi (dikutip oleh prawinandi et al., 2012) yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

### **Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS.**

Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan Deloitte IFRS *presentation and Disclosure Checklist* yang diperoleh dari situs [www.iasplus.com](http://www.iasplus.com).

Beberapa item yang dipilih dari *checklist* tersebut dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia dan penerapannya wajib pada tahun 2013 dan 2014. Rincian jumlah item disajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**PSAK yang telah konvergen dengan IFRS**

NO	NOMOR PSAK	NOMOR IAS	TANGGAL EFEKTIF	JUMLAH ITEM
1	PSAK 13 (Rev.2007) Properti Investasi	IAS 40 <i>Investments Property</i>	01-01-12	25 Item
2	PSAK 14 (Rev.2008) Persediaan	IAS 2 <i>Inventories</i>	01-01-09	4 Item
3	PSAK 16 (Rev.2007) Aset Tetap	IAS 16 <i>Property, Plant, and Equipment</i>	01-01-08	28 Item
5	PSAK 26 (Rev.2011) Biaya Pinjaman	IAS 23 <i>Borrowing Costs</i>	01-01-12	2 Item
7	PSAK 30 (Rev.2011) Sewa	IAS 17 <i>Leases</i>	01-01-12	21 Item

Sumber: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) dan *Deloitte IFRS presentation and Disclosure Checklist*

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1. Jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*).

$$\text{MANDSCR}_{\text{BY}} = \frac{\sum \text{SCRBY}}{\sum \text{MAXBY}} \times 100\%$$

#### Hasil Penilaian Dan Pembahasan Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai keseluruhan variabel yang digunakan baik variabel independen maupun variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS dan variabel independen yang digunakan adalah Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Komite Audit. Tabel 2 berikut adalah hasil uji deskriptif:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MAND	173	,500	,645	,56995	,039055
KOM	173	2	13	4,02	1,708
KOMIN	173	0	0,8	0,38668	0,116652
KPMJ	173	0	0,81	0,03467	0,099099
KPMINS	173	0	0,992	0,60845	0,298527
KOMAUDIT	173	1	6	2,05	0,371

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yang dilakukan perusahaan manufaktur sebesar 0,56995 atau 56,99 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS masih jauh di bawah standar yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM melalui KEP-134/BL/2006 yang menyatakan bahwa perusahaan publik wajib mengungkapkan pengungkapan wajib sebesar 100 persen, sedangkan di Indonesia tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* hanya 69,95 persen.

Nilai diketahui rata-rata variabel jumlah anggota dewan komisaris sebesar 4 dengan standar deviasi 1,708 menunjukkan bahwa data yang digunakan merupakan data homogen atau terdapat variasi data yang sedikit. Nilai minimum sebanyak 2 anggota menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu UU No. 40 pasal 92 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mensyaratkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris paling minimum sebanyak 2 orang.

variabel proporsi komisaris independen tahun memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,80 atau 80 persen. Rata-rata proporsi komisaris independen selama selama 2 tahun sebesar 0,38668 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki proporsi dewan komisaris independen diatas 30 persen. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI telah memenuhi ketentuan BEI tentang dewan komisaris independen, yaitu minimal proporsi dewan komisaris independen 30 persen. Standar deviasi yang berada di bawah nilai rata-rata 0,116652 menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen atau terdapat variasi data yang sedikit.

Nilai minimum pada variabel kepemilikan manajerial minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,810 atau 81 persen. Rata-rata kepemilikan manajerial selama periode 2 tahun sebesar 0,03467 atau 3,46 persen dengan sebaran data sebesar 0,099099. Standar deviasi yang berada diatas nilai rata-rata menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data heterogen atau terdapat banyak variasi data.

variabel kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,992. Rata-rata kepemilikan institusional selama 2 tahun penelitian menunjukkan nilai 0,60845 dengan standar deviasi sebesar 0,298527. Nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian merupakan data homogen yang berarti terdapat variasi data yang

sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan manufaktur cenderung dimiliki oleh pihak institusi.

rata-rata bvariabel jumlah anggota komite audit sebesar 2,05 dengan standar deviasi 0,404 menunjukkan bahwa data yang digunakan merupakan data homogen atau memiliki variasi data yang sedikit. Nilai minimum yang dimiliki perusahaan adalah 1 yang menunjukkan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana di dalamnya termasuk *mandatory disclosure* (Kent dan Stewart: 2008).

Analisis regresi yang telah dilakukan dalam pengujian ini adalah model regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

### Hasil Analisis Dan Pembahasan

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,633	,021		29,442	,000
KOM	-,004	,002	-,156	-2,100	,037
KOMIN	-,019	,025	-,058	-,790	,431
KPMJ	,040	,030	,102	1,349	,179
KPMINS	-,034	,010	-,257	-3,333	,001
KOMAUDIT	-,011	,008	-,101	-1,379	,170

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pada tabel di atas dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 0,633 menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan variabel independen maka tingkat pengungkapan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebesar 63,3 persen. Koefisien regresi jumlah anggota dewan komisaris sebesar 0,004 menunjukkan bahwa apabila jumlah dewan komisaris meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS akan meningkat 0,4 persen. Koefisien regresi kepemilikan institsional sebesar 0,034 menunjukkan bahwa apabila kepemilikan institsional meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS akan meningkat 0,34 persen.

Penjelasan mengenai persamaan regresi yang telah dilakukan hanya berfokus kepada variabel jumlah anggota dewan komisaris dan kepemilikan institsional dalam penelitian ini merupakan variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Berdasarkan hasil  $t$  menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. kenaikan tingkat kepatuhan *manddatory disclosure* konvergensi

IFRS karena dewan komisaris sangat teliti dalam melakukan tugasnya. Selain itu dewan komisaris pihak yang menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksanakannya akuntabilitas.

### **Proporsi Komisaris Independen**

Hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Terdapat pula alasan yang mendukung hasil penelitian ini adalah dimana pemegang saham lebih mempercayakan perusahaan kepada komisaris dari internal perusahaan karena dianggap lebih mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan perusahaan dengan proporsi komisaris independen kecil dapat memiliki tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS besar, begitu pula sebaliknya perusahaan dengan proporsi komisaris independen besar dapat pula memiliki tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvvergensi IFRS kecil, maka besar kecilnya Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Kepemilikan Manajerial**

Hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Alasan mendasar atas hal ini disebabkan karena masih minimnya penerapan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan manajerial belum mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

### **Kepemilikan Institusional**

Hasil uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak untuk mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan standar utami (2012).

### **Jumlah Anggota Komite Audit**

Hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Data pada penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, karena kepemilikan jumlah anggota komite audit di perusahaan dengan jumlah di

bawah rata-rata menunjukkan sedikit maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS juga sedikit, sedangkan untuk jumlah anggota komite yang ada di atas rata-rata lebih banyak maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS juga semakin tinggi. . Jika jumlah anggota komite audit terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas-tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang lebih tinggi Wardani (2012).

### **Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Variabel Anggota Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini karena dalam teori agensi bahwa manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajerial dan memantau kinerja *chief executive officer* sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

konvergensi IFRS. Hal ini karena besar dan rendahnya proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam perusahaan.

Variabel jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini karena jika jumlah anggota komite terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit menjadi sulit dilakukan sehingga tugas-tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS yang lebih tinggi, Wardani (2012).

Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini karena masih minimnya penerapan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen pada perusahaan manufaktur.

Variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini karena adanya monitoring-monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak untuk mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan standar utami (2012).

Penelitian ini mempunyai keterbatasan (1) Subyektifitas peneliti dalam memahai data laporan

tahunan sangat mempengaruhi interpretasi peneliti dalam mengukur jumlah pengungkapan informasi variabel yang diperlukan. (2) Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk jenis industri atau perusahaan lain karena tiap perusahaan dalam pengungkapannya belum tentu mengungkapkan item yang sama karena kepatuhan tiap perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan item maksimal pada IAS yang diterapkan.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel yang terkait seperti *corporate governance* yang dapat dilihat dari aspek aktivitas rapat komite audit dan rapat dewan komisaris. (2) Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan regulasi terbaru yang terkait dengan variabel penelitian.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Al - Akra, M., I. A., Eddie Dan M. J. Ali. 2010. The Influence Of The Introduction Of Accounting Disclosure Regulation On *Mandatory Disclosure* Complianc E: Evidence From Jordan. The British Accounting Review 42: 170 – 186.
- Badan Penerbit Universitas Diponegoro ISBN : 979.704.300.2
- Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. 2010. Kajian Tentang Pedoman Good *Corporate Governance* Di Negara - Negara Anggota ACMF.

- [Http://Www.Bapepam.Go.Id/Pasar\\_Modal/Publikasi\\_Pm/Kajian\\_Pm/Studi](http://Www.Bapepam.Go.Id/Pasar_Modal/Publikasi_Pm/Kajian_Pm/Studi) - 2010/Pedoman GCG di Negara Anggota ACMF.Pdf . 26 Februari 2012.
- Deloit Te Touche Tohmatsu. 2009. International Financial Reporting Standards. Presentation And Disclosure Checklist 2009. [Http://Www.Iasplus.Com/Fs/2009ifrschecklist.Pdf](http://Www.Iasplus.Com/Fs/2009ifrschecklist.Pdf) . 15 April 2011.
- Ferry dan Diyanti. (2010). *Mekanisme Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, Dan Mandatory Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Tesis).
- Gamayuni, R. R. (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 153-166.
- Gantowati, E., & Nugraheni, R. L. (2014). The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011). *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(4), 389-403.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang:
- Hamzah, M.Z., Dan Suparjan, A. 2009. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, Vol. 9, No. 1, April 2009.
- Haniffa, R. M., Dan T. E. Cooke. 2005. The Impact Of Culture And Governance On Corporate Social Reporting. *Journal Of Accounting And Public Policy* 24: 391 – 430.
- Hardiningsih, P. (2010). Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*, 2(1).
- Indrawati, N. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Adopsi Sukarela Internationalfinancial Reporting Standards Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 2(2), 114-126.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Kusumo, Y. B., & Subekti, I. (2014). Relevansi Nilai Informasi Akuntansi, Sebelum Adopsi IFRS Dan Setelah Adopsi IFRS Pada Perusahaan Yang Tercatat Dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).

- Muh. Arief Effendi. 2009. *Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* Jakarta: Salemba Empat
- Nurul, H.U.Dewi, 2015. *Adaptability Fair Value Accounting at The Public Company In Indonesia. 10<sup>th</sup> International Conference On Business and Commerce.*
- Novianti, L. 2009. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 14 (2): 211 – 232.
- Pitasari, A., & Septiani, A. (2014). Analisis Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi Ifrs Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 132-140.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H. (2012). Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.*
- Sianipar, G. A. E., & Marsono, M. (2013). Analisis Komparasi Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Pengadopsian Penuh IFRS Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 350-360.
- Sofyan Safri Harahap. 2007. *Teori Akuntansi* Jakarta: PT. Rajagrafindo persada
- Suhardjanto, D., Dan A. N. Afni. 2009. Praktik *Corporate Disclosure* Di Indonesia. Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 14 (2): 125 - 139.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., & Hartoko, S. Investigasi Dalam Konvergensi Ifrs Di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dan Kaitannya Dengan Mekanisme *Corporate Governance.*